

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran berbasis kinerja, dengan adanya reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerja program yang akan dijalankan. Salah satunya dengan pendekatan kinerja. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan pengertian Anggaran Sektor Publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran terpadu (unified budget); (2) kerangka pengeluaran jangka menengah biasa disebut KPJM (medium term expenditure framework); dan (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (performance based budget). Dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Efektivitas dalam konteks anggaran, salah satu kriteria efektivitas anggaran yaitu semakna dengan program kerja organisasi yang bisa memberikan banyak manfaat, baik politik, ekonomi dan lain sebagainya dengan memperhatikan anggaran yang sesuai antara realisasi dan target. Efektivitas melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif atau tidaknya pekerjaan tersebut dapat dilihat dari pencapaian atau hasil dari pekerjaan tersebut.

Selain itu efektivitas juga sangat erat hubungannya dengan proses pekerjaan yang dilaksanakan, apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dan bagaimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Penjabaran mengenai anggaran berbasis kinerja dan efektivitas anggaran ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas, dari penjelasan tersebut serta berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung peneliti menemukan beberapa fenomena.

Fenomena permasalahan yang peneliti temukan berkaitan dengan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan Efektivitas Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Permasalahan yang terjadi berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung terkait anggaran berbasis kinerja yang dimana fokus permasalahan pada

laporan realisasi anggaran belanja daerah dan capaian kinerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2013-2015, yaitu adanya permasalahan dalam tahap implementasi anggaran belanja langsung dengan rincian program kegiatan yang telah dilaksanakan masih menimbulkan beberapa permasalahan terkait target dan realisasi anggaran yang diduga masih belum efektif dikarenakan terjadi fluktuasi anggaran dan realisasi tidak mencapai target anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

Permasalahan ini diperkuat dengan data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Capaian Kinerja Badan Tahun Anggaran 2013-2015 yang didapatkan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini memberikan implikasi yang cukup luas terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Hal tersebut diduga berdampak pada realisasi anggaran daerah yang belum tersalur secara maksimal.

Kemudian terkait fenomena permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas dalam hal anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Permasalahan yang terjadi berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung terkait efektivitas anggaran yang dimana permasalahan ini masih berhubungan dengan permasalahan anggaran berbasis kinerja yang berfokus pada laporan realisasi anggaran belanja daerah dan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2013-2015 yang diduga masih belum optimalnya efektivitas anggaran yang berfokus pada belanja langsung terhadap program kegiatan dimana anggaran belanja langsung dari tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi dan target anggaran

tidak sesuai dengan realisasi, hal ini mengindikasikan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung diduga masih belum menerapkan anggaran berbasis kinerja secara efektif berdasarkan permasalahan dan data laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja badan karena anggaran belanja yang ditetapkan selama 3 tahun anggaran tidak tercapai dalam realisasinya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, peneliti mendapatkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan data LAKIP BKD tahun 2013, 2014 dan 2015 secara keseluruhan terkait anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas anggaran diduga masih belum menunjukkan adanya peningkatan realisasi terhadap target anggaran dalam pelaksanaannya dan mengalami fluktuasi atau tidak stabilnya anggaran pada setiap tahunnya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2013-2015

Uraian		Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja	Langsung	40.570.867.413,00	35.390.014.900,00	87,23%
(2013)				
Belanja	Langsung	34.560.453.693,03	32.639.193.713,00	94,44%
(2014)				
Belanja	Langsung	37.261.900.690,00	35.075.749.521,00	94,13%
(2015)				

Sumber Data: *LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018*

Tabel 1.2
Capaian Realisasi/Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2013-2015

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2014-2016						Sumber
		Anggaran 2013	Realisasi 2013	Anggaran 2014	Realisasi 2014	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Dana
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.090.023.913,00	24.050.984.000,00	21.306.422.197,00	20.864.993.897	23.695.508.671,00	22.515.406.951,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.034.646.000,00	2.749.045.900,00	2.935.537.900,00	2.622.319.224,00	895.013.00,00	810.278.818,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	176.400.000,00	170.500.000,00	153.900.000,00	150.730.800,00	25.000.000,00	24.950.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.460.000,00	63.187.000,00	45.500.000,00	17.028.000,00	41.757.000,00	39.310.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	576.437.500,00	541.506.000,00	371.055.000,00	355.133.100,00	705.396.675,00	700.566.028,00	APBD
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.627.900.000,00	8.356.298.000,00	9.748.038.596,03	8.628.988.692,00	11.899.225.344,00	10.983.237.724,00	APBD
JUMLAH		40.570.867.413,00	35.390.014.900,00	34.560.453.693,03	32.639.193.713,00	37.261.900.690,00	35.075.749.521,00	APBD

Sumber Data : LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dan 1.2 mengenai Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja BKD Kabupaten Bandung. Fenomena dan permasalahan yang terjadi adalah berkaitan dengan penggunaan alokasi anggaran yang tidak terealisasi dengan optimal sesuai dengan rencana alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara target anggaran dengan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 dari data capaian kinerja program yang dituangkan dalam LAKIP, meskipun menurut pedoman penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dikategorikan baik, namun dalam efektifitas anggaran masih belum optimal.

Dapat dilihat anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk BKD selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi atau tidak stabil dan berdampak pada penyerapan anggarannya yang belum optimal tidak mencapai target 100%. Pada anggaran tahun 2013 adalah anggaran tertinggi selama 3 tahun terakhir sebesar Rp. 40.570.867.413,00 dengan realisasi anggaran Rp. 35.390.014.900,00 dengan presentase 87,23%. Pada tahun 2014 dimana anggaran belanja menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 34.560.453.693,03 begitupun dalam realisasi anggarannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp. 32.639.193.713,00 dengan presentase 94,44%. Terakhir pada tahun 2015 anggaran belanja yang diberikan pemerintah terhadap BKD mengalami kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 37.261.900.690,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.075.749.521,00 dengan presentase 94,13%.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diidentifikasi bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum berjalan dengan optimal di

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dengan rincian data diatas bahwa realisasi anggaran masih belum 100% mencapai target anggaran yang telah direncanakan. Sehingga dalam hal ini Efektivitas Anggaran dalam pencapaian targetnya kurang baik dan harus adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi dalam menjelaskan proses dari hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan perhitungan dan analisis kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan tingkat realisasi, ternyata tingkat pencapaian atas kegiatan dan sasaran menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2013 yaitu 87,23%, pada tahun 2014 adalah 94,44% dan pada tahun 2015 yaitu 94,13%. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terjadi fluktuasi anggaran yaitu penurunan pada realisasi anggaran tahun 2013 ke tahun 2014 kemudian peningkatan realiasi anggaran pada tahun 2014 ke tahun 2015.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Adanya RKA-SKPD ini diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan efektivitas anggaran, dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi,

efisien dan efektif di dalam pelaksanaannya dan mencapai suatu hasil (outcome). Kemudian melakukan penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil).

Fenomena-fenomena diatas mengindikasikan bahwa efektivitas anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung diduga masih belum optimal hal ini diindikasikan karena anggaran berbasis kinerja yang diduga masih belum dapat diterapkan dengan baik, karena berbagai faktor.

1. Terjadinya fluktuasi atau ketidak stabilan target anggaran dan realisasi di tiap tahunnya.
2. Tidak tercapainya target anggaran yang telah direncanakan selama 3 tahun terakhir.
3. Realisasi selalu lebih rendah dari target anggaran yang telah direncanakan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya fluktuasi atau tidak stabil nya target anggaran dan realisasi di tiap tahunnya.
2. Tidak tercapainya target anggaran yang telah direncanakan selama tahun terkahir.
3. Realisasi selalu lebih rendah dari target anggaran yang telah direncanakan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas anggaran?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.”

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sumbangan pemikiran dalam mengembangkan keilmuan

dalam bidang ilmu sosial, serta menambah wawasan dalam keilmuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Anggaran.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memperluas kemampuan berfikir dan menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Anggaran.

b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Anggaran.

c. Untuk peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifik dan lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Fokus pemikiran penelitian ini adalah Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Anggaran, yang menjelaskan salah satu pelaksanaan dari kegiatan Administrasi Negara, khususnya administrasi keuangan negara. Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan cukup

penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut M. Nafarin (2007;11) mengemukakan bahwa anggaran adalah "Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan."

Anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan pada program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian anggaran menurut Sony Yuwono, dkk (2005;27) adalah sebagai berikut :

"Suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi."

Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi. Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam membuat rencana-rencana kerja. Dasar penyusunan anggaran pada rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (programming). Menurut M. Narifin (2007;12) dikemukakan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
2. Data-data waktu yang lalu.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi.
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak gerik pesaing.
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah.
6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tersebut pada uraian diatas berguna supaya anggaran yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh dan akurat sehingga tujuan dan sasaran organisasi ataupun perusahaan dapat tercapai. Menurut Bastian (2010:107) pengertian anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (output measurement) sebagai indikator kinerja organisasi.

Anggraini dan Puranto (2010:100) anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Adapun prinsip-prinsip atau dimensi anggaran sebagai berikut menurut Anggraini dan Puranto (2010:106-107):

1) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

2) **Disiplin Anggaran**

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

3) **Keadilan Anggaran**

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi

dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penyusunan Anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Menurut Anggraini dan Puranto (2010:101), ABK yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber *input* dan bagaimana keterkaitannya dengan *output/outcome* untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2002:105) mengungkapkan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hasil prestasi yang dicapai suatu organisasi (Maman Ukas, 2004:56).

Efektivitas secara umum adalah berkaitan dengan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan dicapainya tujuan dari suatu organisasi tertentu maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Menurut Mardiasmo (2005:132) menyatakan pengertian efektivitas sebagai berikut, “Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.”

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

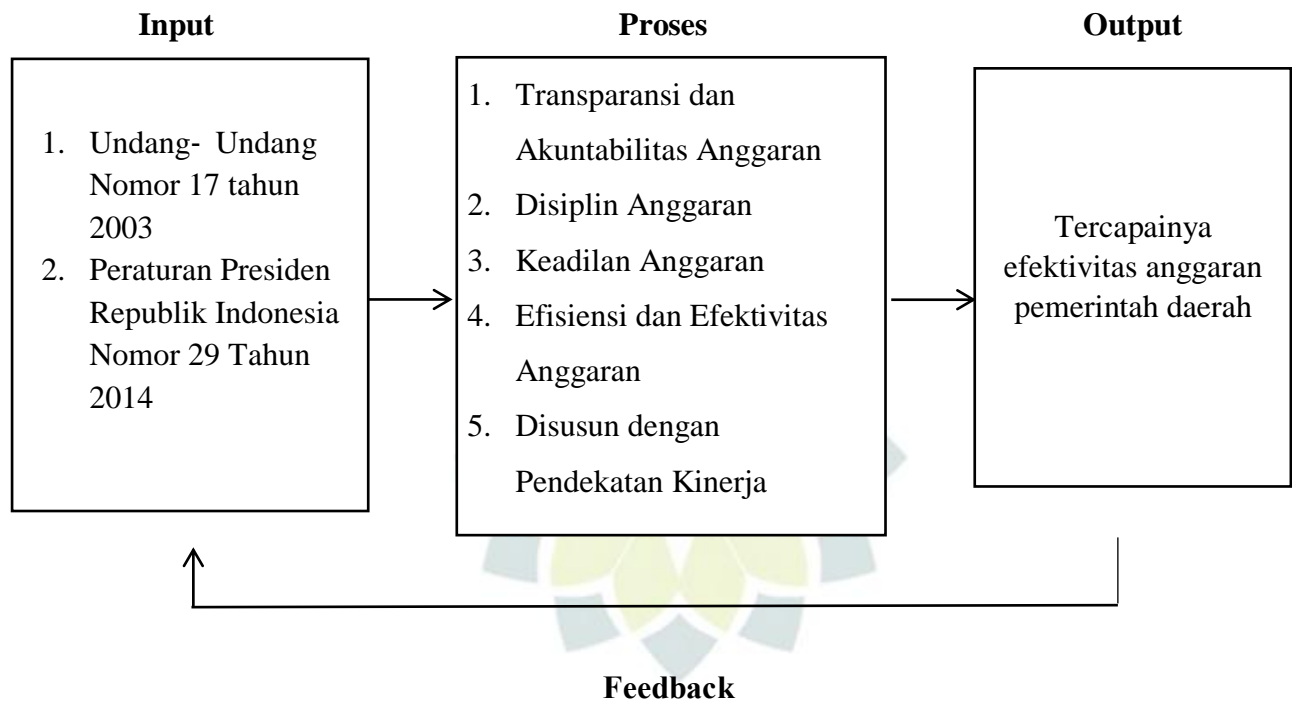
Menurut Mardiasmo (2009:3-7) dimensi efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Output
Output (Keluaran) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan/input yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.
2. Outcome
Outcome (Hasil) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel, maka disajikan skema kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Skema Kerangka Berfikir



G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menyatakan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut: adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dan disusun dengan pendekatan kinerja.